

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Manusia memiliki dorongan alamiah untuk membangun komunitas hidup bersama. Kodratnya sebagai makhluk sosial diejawantahkan dalam relasi dengan sesama. Dorongan untuk hidup bersama dengan orang lain timbul dari kesadaran manusia akan eksistensinya sebagai *homo socius*. “Kesadaran adalah suatu prasyarat dari ada”.¹ Manusia menyadari keberadaannya sebagai makhluk sosial. Maka dari itu, dia menjalin relasi dengan sesama demi mengaktualisasikan hakekat sosialnya. Relasi sosial menjadi syarat bagi manusia dalam menciptakan kesejahteraan umum (*bonum commune*).

Tahap hidup bersama yang paling sederhana adalah pendirian rumah tangga. Dalam rumah tangga terjadi persekutuan pria dan wanita. Keduanya mengemban peran dan tugas mereka sebagai suami-isteri. Asosiasi suami-isteri dikenal oleh khalayak ramai dengan nama keluarga. Keluarga merupakan institusi dasar dari masyarakat. Keluarga memiliki peranan yang penting dalam kehidupan negara atau *polis*. *Polis* akan tetap menampilkan keberadaannya jika ada individu-individu yang menjalankan kehidupan. Keluarga berperan untuk menghasilkan manusia baru. Keluarga menjadi basis dari kehidupan *polis*.

Masyarakat berasal dari keluarga. Nilai-nilai kehidupan harus diperkenalkan sejak dalam rumah tangga. Kesiediaan untuk menjalin relasi dengan sesama menjadi salah satu aspek yang harus diperkenalkan dalam masa pembinaan awal di dalam keluarga. Kepribadian seseorang ditempa dalam keluarga. Manusia belajar hidup bersama melalui pengalaman yang

¹ Carl Gustav Jung, *The Undiscovered Self*, dalam Agus Cremers dan Martin Warus (Penerj.), *Diri Yang Belum Ditemukan*, (Mauere: Ledalero, 2003), hal. 90.

dialami oleh mereka dalam rumah tangga. Suami-isteri bertindak sebagai pendidik atau guru yang mengajarkan nilai-nilai kehidupan kepada anak-anak mereka.

Kehadiran individu baru berdampak pula pada kehidupannya sendiri. Manusia sudah menerima anugerah kehidupan dan diapun harus bertanggung jawab atas rahmat tersebut. Manusia memiliki kewajiban untuk merawat dan menjaga pemberian tersebut. Kehidupan manusia dapat berlangsung dengan baik jika semua kebutuhannya terpenuhi. Akan tetapi, kemampuan manusia tidak memadai. Oleh karena itu, dia mendirikan asosiasi hidup bersama dalam lingkup yang lebih luas. Hal ini bertujuan untuk menghimpun berbagai kekuatan dan kemampuan yang ada pada individu lain. Potensi tersebut harus diwujudkan dalam kehidupan riil manusia. Kondisi inilah yang mendorong manusia untuk mendirikan *polis*.

Polis atau kota adalah bentuk pelembagaan esensi manusia selaku makhluk sosial. Kesosialan manusia mendapat realisasinya dalam *polis*. Dalam dunia Yunani Kuno, *polis* dipandang sebagai institusi yang sangat beradab. Ungkapan ini hendak menunjukkan bahwa hanya manusia yang dapat mendirikan koloni hidup bersama di sebuah *polis*. Hewan infrahuman memang hidup berkelompok, tetapi hal itu dilakukan atas dasar dorongan alamiah saja. Dengan lain perkataan, hewan membentuk kelompok hidup bersama tanpa melibatkan kesadaran. Manusia berbuat demikian karena dimotori oleh kehendak untuk mencapai *bonum commune*. Bahwasanya, *bonum commune* bisa terwujud di dalam *polis*.

Kehidupan politik merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari diri manusia. Bagi orang Yunani Kuno, *polis* mencerminkan hakekat manusia sebagai hewan politik (*zoon politikon*). Kondisi ini memungkinkan individu untuk membentuk sebuah *koinonia*. “Hanya manusia memiliki kualitas yang memungkinkan sebuah eksistensi komunal”.² Salah satu kualitas yang menjelunat dalam diri manusia adalah *logos*. *Polis* dipandang sebagai bentuk

² Rahmah Asa Harun (Penerj.), *Peradilan Socrates*, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1991), hal. 8.

tertinggi dari *koinonia*. *Logos* memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan *polis*. *Logos* tidak saja menyangkut kemampuan berbicara, tetapi juga menyentuh dimensi akal dan moralitas. Kapasitas seperti ini hanya terdapat dalam diri manusia.

Bonum commune bisa dicapai jika ada kerja sama antarindividu. *Polis* akan tetap eksis kalau para warganya terlibat aktif di dalamnya. Aristoteles menandakan bahwa keberadaan *polis* sangat berkaitan erat dengan keterlibatan masyarakat. Maka dari itu, atmosfer kehidupan *polis* dapat berjalan lancar apabila manusia beraksi atau berbuat sesuatu. Soalnya, *polis* diidentikkan dengan kehidupan manusia sendiri. Akan tetapi, kehidupan yang dijalankan oleh manusia tidak sekadar berada dalam *polis* tanpa beraksi. Sebaliknya, dia bergiat bersama dengan sesamanya yang lain demi mewujudkan *bonum commune* atau kebaikan bersama. Tatkala manusia berhenti untuk bergiat, maka lenyaplah *polis*. Oleh karena itu, menjadi warga (*polites*) dianggap sebagai hal yang sangat penting dan terhormat.

Ada tiga unsur penting yang sangat berpengaruh pada pencapaian *bonum commune*, yakni masyarakat, konstitusi dan *polis*. Ketiga hal ini saling berhubungan satu sama lain. Konstitusi dianggap sebagai roh dari *polis*. Dari sebab itu, konstitusi menempati posisi yang tinggi. Walaupun demikian, warga negara kota (*polis*) tetap menjadi sentrum dari kehidupan *polis*. Konstitusi hanya dapat diciptakan oleh manusia. Hal serupa berlaku juga dalam mendirikan *polis*. Manusia mengungkapkan *potentia*-nya sebagai makhluk politis dengan menciptakan konstitusi dan membangun *polis*.

Keberadaan *polis* tidak terlepas dari konstitusi. Konstitusi menampilkan identitas *polis*. Partisipasi warga dalam hal memerintah dan diperintah, ditetapkan menurut konstitusi yang berlaku dalam *polis*. Aristoteles menguraikan enam jenis konstitusi. Dia mengatakan bahwa ada model konstitusi yang baik dan terdapat pula tipe konstitusi yang buruk. Ketiga model konstitusi yang baik terdiri atas monarki, aristokrasi dan *politeia*. Menurut Aristoteles, konstitusi yang sangat cocok diterapkan dalam kehidupan *polis* adalah *politeia* (semacam

demokrasi yang diatur oleh undang-undang). Namun, ada juga konstitusi yang buruk, yakni tirani sebagai bentuk negasi atas monarki; oligarki merupakan penyimpangan dari aristokrasi; dan demokrasi (bentuk penyimpangan dari *politeia*).

Partisipasi warga dalam kehidupan *polis* diberi penekanan khusus. Aristoteles bahkan mendefinisikan warga negara sebagai sekelompok orang yang mengambil bagian dalam keanggotaan deliberasi dan yudisial. Kedua lembaga ini menjadi unsur penentu perekrutan warga *polis*. Penetapan warga negara kota (*polis*) tidak didasarkan pada status kelahiran atau domisili belaka, tetapi ditentukan menurut partisipasi manusia dalam kehidupan *polis*. Dalam hal ini, seseorang yang masuk dalam lembaga deliberasi dan yudisial dikategorikan sebagai warga negara. Di sinilah letak kekhasan *polis* Yunani Kuno, di mana hak kewarganegaraan hanya diberikan kepada mereka yang bergabung dalam lembaga deliberatif dan yudisial. Itu berarti, hak kewarganegaraan tidak diterima oleh semua orang.

Hal senada juga dikatakan oleh Nikolas Driyarkara dalam pandangannya tentang hidup *menegara*. *Raison d'être* negara terletak pada kesosialan manusia. Negara dibentuk atas dasar kehendak masyarakat yang berorientasi pada terwujudnya kesejahteraan umum. Dalam hal ini ada kesamaan orientasi antara Aristoteles dan Nikolas Driyarkara. Dari sebab itu, masyarakat harus *menegara* dan tidak sekadar *bernegara*. Hal ini hendak menegaskan pentingnya partisipasi warga dalam kehidupan negara.

Dengan kata *menegara*, Nikolas Driyarkara mau menandakan bahwa menjadi masyarakat dari sebuah negara, manusia tidak hanya sekadar 'mendiami atau berada dalam negara (*bernegara*)'. Dia harus melibatkan diri dalam kegiatan politik demi mewujudkan kebaikan tertinggi (*bonum commune*). Di sini terdapat korelasi pemikiran antara Aristoteles dan Nikolas Driyarkara, di mana keduanya menekankan partisipasi warga dalam membangun hidup bersama di sebuah negara. Partisipasi warga menjadi hal yang paling mendasar dari semua ketentuan yang ada. Tanpa partisipasi dari warga negara yang baik, mustahil *bonum*

commune bisa tercapai. Warga negara yang baik pasti terlibat aktif dalam kehidupan negara. Komponen yang ada di suatu negara terdiri atas rakyat dan tanah beserta keadaannya. Seorang warga yang sejati mesti membangun kerja sama yang baik dengan orang lain.

Nikolas Driyarkara menempatkan manusia sebagai peletak dasar dari hidup *menegara*. Manusia menjadi *motor primus* yang menciptakan peradaban. Hal ini terjadi karena kapasitas kejiwaan yang dimiliki oleh setiap manusia, tetapi tidak terdapat dalam hewan infrahuman. Komponen kejiwaan tersebut mencakup pikiran, perasaan dan kehendak. Semuanya ini menyatu dalam diri manusia yang dikenal dengan istilah kesatuan jiwa-badan. Kesatuan ini membentuk jati diri seseorang selaku ‘pribadi’. Manusia adalah pribadi yang *mempribadikan* diri, pribadi yang membentuk kebangsaan dan pribadi yang menghasilkan kebudayaan. Sentrum dari semuanya itu ialah aktivitas dari *animal rationale*.

Sebagai pribadi yang *mempribadikan* diri, manusia senantiasa terus berproses dalam pembentukan identitasnya. Identitas manusia tidak hanya ditentukan sendiri, tetapi juga ditempa oleh berbagai pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dari lingkungan luar. Pengaruh-pengaruh asing yang positif turut memberikan sumbangsih bagi perkembangan kepribadian kita. Masyarakat juga dikenal sebagai pribadi yang membentuk kebangsaan. Misi dasar pembentukan sebuah negara adalah untuk mewujudkan kesatuan antarindividu. Berkat kesatuan tersebut, manusia bisa memanifestasikan *bonum commune*. Nikolas Driyarkara menyinggung pula soal manusia sebagai pribadi yang menghasilkan kebudayaan.

Manusia itu makhluk yang berbudaya. Hal ini menjadi ciri pembeda yang khas antara manusia dengan makhluk ciptaan lainnya. Oleh karena budi yang dimilikinya, manusia mampu menciptakan kebudayaan. “Maka dari itu, dinamika kebudayaan mengingatkan kita bahwa kebudayaan adalah kebudayaan manusia, dalam arti bahwa manusia adalah pelaku dan penentu

kebudayaan”.³ Kebudayaan itu bersifat dinamis karena pencetus kebudayaan itu sendiri merupakan makhluk yang dinamis. Kebudayaan tidak hanya menyangkut kenangan masa silam yang perlu diwariskan secara turun-temurun. Sebaliknya, kebudayaan bersentuhan langsung dengan situasi riil manusia dan berbenturan dengan berbagai kekuatan luar.

5.2 Catatan Kritis

Kemajuan suatu bangsa atau negara bergantung pada sumber daya yang dimilikinya. Sumber daya tersebut mencakup sumber daya alam dan sumber daya manusia. Alam semesta menyediakan berbagai kekayaan yang dapat digunakan untuk kesejahteraan manusia. Akan tetapi, kekayaan alam perlu dibudidayakan. Maka dari itu, dibutuhkan peranan manusia untuk mengolah kekayaan alam. Kemampuan manusia dalam berinovasi sangat dititikberatkan. Di sinilah sumber daya manusia memainkan peranan utama.

Aristoteles dan Nikolas Driyarkara sangat menekankan peranan manusia dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Meskipun keduanya hidup dalam zaman yang berbeda, namun mereka memiliki kesamaan persepsi. Dalam hal ini, pemikiran mereka lebih mengarah kepada pengalaman eksistensial manusia selaku makhluk sosial. Aristoteles menjabarkan sejumlah pemikiran yang berkaitan dengan manusia. Salah satunya adalah tentang esensi manusia selaku makhluk sosial. Pandangan ini masih ada korelasinya dengan pemikiran dari Nikolas Driyarkara. Nikolas Driyarkara menegaskan pandangan Thomas Hobbes yang mendefinisikan manusia sebagai *homo homini lupus*. Dia justru melihat manusia selaku *homo socius*. Di sini, dia mengedepankan aspek sosialitas dari manusia. Hubungan pemikiran antara Aristoteles dan Nikolas Driyarkara tentang manusia terdapat pada tataran pengertian ini.

Masyarakat menjadi tiang negara. Partisipasi warga dalam kehidupan negara sangat mutlak diperlukan. Oleh sebab itu, Aristoteles memulai suatu revolusi pemikiran dalam dunia

³ Paulus Budi Kleden, *Teologi Terlibat: Politik Dan Budaya Dalam Terang Teologi*, (Maukere: Ledalero, 2003), hal.8.

politik. Menurut dia, kekhasan warga negara terletak pada partisipasinya dalam *polis*. Aristoteles menetapkan dua lembaga utama sebagai wadah utama bagi warga negara untuk mewujudkan keterlibatannya dalam bidang politik, yakni lembaga deliberatif dan lembaga yudisial. Kedua lembaga tersebut dipandang sebagai patokan atau pedoman penetapan warga negara. Masyarakat harus memiliki waktu luang supaya bisa masuk di dalamnya.

Penulis hendak mengkritisi pemikiran Aristoteles dan Nikolas Driyarkara. Limitasi pembahasan dipusatkan pada gagasan tentang teori kewarganegaraan perspektif Aristoteles dan hidup *menegara* menurut Nikolas Driyarkara. Pemikiran Aristoteles dan Nikolas Driyarkara masih relevan dengan situasi politik sekarang ini. Meskipun Aristoteles hidup pada zaman Yunani Kuno, namun pemikiran politiknya dapat dijadikan rujukan. Akan tetapi, penulis tidak setuju dengan teori kewarganegaraan yang dicetuskannya. Dia membuat suatu pembedaan yang sangat diskriminatif. Hal itu ditunjukkannya dalam proses penetapan warga *polis*. Bahwasanya, yang berhak untuk menjadi warga *polis* hanyalah laki-laki dewasa. Wanita dan anak-anak serta para budak tidak termasuk dalam kelompok warga negara.

Ada ketentuan lain yang dicanangkan oleh Aristoteles berkaitan dengan penetapan warga *polis*. Hak kewarganegaraan hanya dimiliki oleh laki-laki dewasa yang bebas serta terlibat aktif dalam keanggotaan deliberatif dan yudisial. Namun, tidak semua laki-laki dewasa yang ‘bebas’, direkrut menjadi warga negara. Aristoteles mengatakan bahwa para pekerja kasar seperti: petani dan montir tidak masuk dalam kategori warga *polis*. Alasannya adalah karena *polis* membutuhkan kaum intelek dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal yang serupa juga dikemukakan oleh Nikolas Driyarkara. Bagi Nikolas Driyarkara, masyarakat hendaknya ‘bergiat atau berbuat sesuatu’ untuk negara. Aksi warga negara ditampakkan melalui keterlibatan mereka dalam mewujudkan *bonum commune*.

Penulis melihat bahwa Aristoteles terlalu menganggap remeh peranan kaum pekerja kasar. Padahal mereka juga turut menopang kehidupan *polis*. Misalnya, seorang petani dapat

menyumbangkan hasil pertaniannya untuk dikonsumsi warga *polis*. Bahan-bahan pangan merupakan produk dari para petani. Tanpa makanan, manusia tidak bisa mempertahankan kelangsungan hidupnya. Lalu dari Nikolas Driyarkara, penulis menemukan suatu keunikan. Dia menganalogikan negara dengan kehidupan itu sendiri. Ketika tidak ada lagi kehidupan, maka lenyaplah negara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Pustaka Primer

- Barnes, Jonathan (Ed.), *Complete Works Of Aristotle*, New Jersey: Princeton University Press, 1984.
- Benjamin Jowett (Penerj.), *Politics Of Aristotle*, Kitchener: Batoche Books, 1999.
- Driyarkara, Nikolas, *Negara Dan Bangsa*, Yogyakarta: Kanisius, 1980.
- Sudiarja, A. dan G. Budi Subanar (Eds.), *Karya Lengkap Driyarkara*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006.

B. Pustaka Sekunder

- Baghi, Felix, *Kewarganegaraan Demokratis Dalam Sorotan Filsafat Politik*, Maumere: Ledalero, 2009.
- Bakker, Anton, *Metode-Metode Filsafat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- _____, *Ontologi Metafisika Umum*, Yogyakarta: Kanisius, 1992.
- Bertens, Kees, *Ringkasan Sejarah Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1975.
- _____, *Filsafat Barat Kontemporer Inggris-Jerman*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1981.
- _____, *Sejarah Filsafat Yunani*, Yogyakarta: Kanisius, 1999.
- Driyarkara, Nikolas, *Pertjikan Filsafat*, Jakarta: PT Pembangunan Djakarta, 1963.
- _____, *Filsafat Manusia*, Yogyakarta: Kanisius, 1969.
- Feibleman, James K., *Understanding Philosophy*, Mumbai: Jaico Publishing House, 1996.
- Garvey, James, *20 Karya Filsafat Terbesar*, Yogyakarta: Kanisius, 2010.
- Hadiwijono, Harun, *Sari Sejarah Filsafat Barat I*, Yogyakarta: Kanisius, 1980.
- Hamersma, Harry, *Pintu Masuk Ke Dunia Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1981.
- Harun, Rahmah Asa (Penerj.), *Peradilan Socrates*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1991.
- Hatta, Mohamad, *Alam Pikiran Yunani*, Jakarta: Tintamas Indonesia, 1980.
- Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, 1982.
- _____, *Manusia Merenungkan Dirinya*, Yogyakarta: Kanisius, 1986.

- Inwood, Brad dan Raphael Wolf (eds.), *Eudemean Ethics*, New York: Cambridge University Press, 2013.
- Jegalus, Norbertus, *Hukum Kata Kerja: Diskursus Filsafat Tentang Hukum Progresif*, Jakarta: Obor, 2011.
- Jung, Carl Gustav, *The Undiscovered Self*, dalam Agus Cremers dan Martin Warus (Penerj.), *Diri Yang Belum Ditemukan*, Maumere: Ledalero, 2003.
- Kebung, Konrad, *Manusia Dan Diri Yang Utuh*, Ende: Nusa Indah, 2006.
- Kenyowati, Embun (Penerj.), *Etika Nikomachean Aristoteles*, Jakarta: PT Mizan Publika, 2004.
- Kleden, Paulus Budi, *Dialog Antaragama Dalam Terang Filsafat Proses Alfred North Whitehead*, Maumere: Ledalero, 2002.
- Koten, Yosef Keladu, *Partisipai Politik: Sebuah Analisis Atas Etika Politik Aristoteles*, Maumere: Ledalero, 2010.
- _____, *Teologi Terlibat: Politik, Budaya Dalam Terang Teologi*, Maumere: Ledalero, 2003.
- Lanur, Alex, *Logika Selayang Pandang*, Yogyakarta: Kanisius, 1983.
- Leahy, Louis, *Siapakah Manusia? Sintesis Filosofis Tentang Manusia*, Yogyakarta: Kanisius, 2001.
- Loizou, Andros dan Harry Lesser (Eds.), *Polis And Politics: Essays In Greek Moral And Political Philosophy*, Great Britain: Gower Publishing Company Limited, 1990.
- Madung, Otto Gusti, *Politik: Antara Legalitas Dan Moralitas*, Maumere: Ledalero, 2009.
- Mercier, Jean L., *From Socrates To Wittgenstein: A Critical History Of The Key-Concepts Of Western Philosophy*, Bangalore: Nigel Fernandes For Asian Trading Corporation, 2002.
- Pangle, Thomas L. dan Timothy W. Burns, *The Key Texts Of Political Philosophy*, New York: Cambridge University Press, 2015.
- Pasaribu, Saut (Penerj.), *Politik Aristoteles*, Yogyakarta: Narasi-Pustaka Promothea, 2016.
- Peschke, Karl-Heinz, *Etika Kristiani: Kewajiban Moral Dalam Hidup Sosial*, Maumere: Ledalero, 2003.
- Rapar, Jan Hendrik, *Pengantar Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1996.
- Riyanto, E. Armada, *Berfilsafat Politik*, Yogyakarta: Kanisius, 2014.
- Sabon, Max Boli, *Ilmu Negara*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Sihotang, Kasdin, *Filsafat Manusia: Upaya Membangkitkan Humanisme*, Yogyakarta: Kanisius, 2009.

- Sjamsuddin, Nazaruddin dan Fakhruddin R. Lubis (Penerj.), *Politik Dalam Perspektif Pemikiran, Filsafat Dan Teori*, Jakarta: CV. Rajawali, 1986.
- Smith, Linda dan William Raeper, *Ide-Ide Filsafat Dan Agama Dulu Dan Sekarang*, Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- Snijders, Adelbert, *Antropologi Filsafat Manusia Paradoks Dan Seruan*, Yogyakarta: Kanisius, 2004.
- Soetrisno, Loekman, *Menuju Masyarakat Partisipatif*, Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- Suseno, Franz Magnis, *Mencari Sosok Demokrasi: Sebuah Telaah Filosofis*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- _____, *13 Tokoh Etika Sejak Zaman Yunani Sampai Abad XIX*, Yogyakarta: Kanisius, 1997.
- Sutrisno, Mudji, *Ranah-Ranah Kebudayaan*, Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- Tjahjadi, Simon Petrus L., *Petualangan Intelektual: Konfrontasi Dengan Para Filsuf Dari Zaman Yunani Hingga Zaman Modern*, Yogyakarta: Kanisius, 2004.
- Verhaar, John W.M., *Identitas Manusia Menurut Psikologi Dan Psikiatri Abad Ke-20*, Yogyakarta: Kanisius, 1989.
- Wattimena, Reza A.A., *Demokrasi: Dasar Filosofis Dan Tantangannya*, Yogyakarta: Kanisius, 2016.
- Wibowo, R. Sani dan Benny Beatus Wetty (Eds.), *Filsafat Eksistensialisme Jean Paul Sartre*, Yogyakarta: Kanisius, 2011.

C. Kamus/Ensiklopedi/Jurnal/Manuskrip

- Alwi, Hasan (Ed.), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Bagus, Lorens, *Kamus Filsafat*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Phillips, Patrick dan Ben Francis (Eds.), *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, New York: Oxford University Press, 2010.
- Shadily, Hassan (Ed.), *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: Ikhtiar Baru-Van Hoeve, 1987.
- Jurnal Agama Dan Kebudayaan*, Vol. 3, No. 1, Oktober 2006, Jayapura: Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Abepura.
- Jurnal Ledalero, Wacana Iman Dan Kebudayaan*, Vol. 12, No. 2, Desember 2013, Maumere: Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero.
- Jegalus, Norbert, *Metafisika* (diktat), Kupang: Fakultas Filsafat Unwira, 2013.

Koten, Yosef Keladu, *Etika Politik Aristoteles* (diktat), Maumere: Ledalero, 2008.